

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bergulirnya reformasi dan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah diarahkan kepada beberapa kebijakan pembangunan yang menggambarkan perubahan pembangunan dan pengembangan daerah serta pengelolaan pembiayaan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan aparat daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya agar terwujud penyelenggaraan pembangunan yang demokratis dan desentralistis.¹ Oleh karena itu daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi dan sumber pendapatan daerah. Ciri inovasi daerah yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas menjadi bermakna di mata publik.

Pariwisata merupakan salah satu bidang potensi dan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan daerah.² Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan

¹Rina Munawaroh, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Suwanti, Magelang*, Jurnal Pariwisata, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm.2.

² Agus Bahrudin, *Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah)*, Mimbar Administrasi Issn:9772581101001; Vol. 1 No. 1, Oktober 2017. hlm.2.

pengembangan pariwisata. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan makmur, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Dan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana tersebut diatas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.³

Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata oleh pemerintah, semua daerah yang ada di Indonesia melalui dinas pariwisata setempat mengembangkan dan melakukan pembangunan terhadap potensi alam yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Pemerintah daerah dalam menarik perhatian dan minat kunjungan masyarakat, baik melalui swasta maupun pemerintah membangun semua fasilitas. seperti pembangunan fasilitas pantai, pembangunan hotel atau penginapan, pembangunan jalan, pengadaan transportasi laut dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung. serta melakukan berbagai macam promosi, agar obyek wisata ditempat tersebut mendapat pengunjung dan layak dijadikan sebagai obyek wisata unggulan.

Bagi daerah yang dijadikan sebagai obyek wisata, juga akan menghasilkan devisa bagi negara. Inovasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan

³ *Ibid*, hlm. 4.

pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di daerah. Oleh karena itu daerah perlu melakukan inovasi-inovasi dalam mengembangkan sumber daya yang ada sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat khususnya daerah setempat.

Begitu banyak sektor–sektor yang berhubungan dengan pariwisata, hendaknya pengembangan pariwisata dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat yang ada disekitar area pengembangan pariwisata serta memberikan peluang partisipasi didalamnya. Peluang adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: (a) menjadi pekerja/buruh; (b) konsinyasi; dan/atau (c) pengelolaan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa adanya pelibatan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan pariwisata namun juga menjadi subjek.

Soebagyo yang menyatakan bahwa;⁴

“Penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan dan hasil dari kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakat secara langsung, peran aktif masyarakat sangat menentukan dalam kelangsungan kegiatan pariwisata”.

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang gencar mengembangkan pariwisata pedesaan dengan membentuk desa wisata. Merujuk pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM. 18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

⁴ Hadiwijoyo, Suryo Sakti., *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), hlm. 68.

Pariwisata Melalui Desa Wisata, secara khusus desa wisata yang dimaksud ialah masyarakat yang sudah memiliki salah satu aktivitas desa wisata, diantaranya kegiatan kesenian, kuliner dan bahan baku, produksi kerajinan, pemandu wisata, serta usaha transportasi wisata. Partisipasi dari aktif masyarakat dalam pengembangan desa wisata diharapkan mampu mendorong masyarakat desa untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera dengan memberdayakan sumber daya desa.

Perkembangan desa wisata di Indonesia dapat diketahui melalui data jumlah desa wisata dari renstra Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018. Tercatat ada 1.734 desa wisata di seluruh Indonesia, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik dimana Pulau Jawa-Bali menempati posisi paling tinggi dengan jumlah 857 desa wisata, kemudian diikuti dengan Sumatera sebanyak 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Kalimantan 117 desa. Selain itu, pulau sulawesi juga tercatat sebesar 119 desa wisata, Papua 74 desa dan Maluku sebanyak 23 desa.

Indonesia yang juga mengembangkan desa wisata salah satunya di Provinsi Jambi, Sumatera yakni di Kecamatan Maro Sebo. Kecamatan Maro Sebo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan. Kecamatan ini dikenal dengan kecamatan yang memiliki banyak tempat wisata dengan potensi sumber daya alam yang tinggi . Dapat dilihat dari table berikut yang merupakan desa wisata di Kecamatan Maro Sebo:

Tabel 1.1.

**Desa Di Kecamatan Maro Sebo yang memiliki tempat wisata
berdasarkan pengelolaannya**

No	Nama Desa	Potensi / SDA Wisata	Pengelola
1	Muaro Jambi	Candi Muaro Jambi	Pemerintah Daerah
2	Desa Danau Lamo	Candi Mahligai	Swasta/ Masyarakat
3	Desa Baru Jambi Tulo	Lubuk Penyengat	Swasta/ Masyarakat
4	Desa Muhajirin	Sungai Napal	Swasta/ Masyarakat
5	Desa Muaro Jambi	Umo Teluk	Swasta/ Masyarakat
6	Desa Simpur	Sungai Simpur	Swasta/ Masyarakat

Sumber: Jambiline.com

Desa Baru Jambi Tulo adalah salah satu desa di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang terkenal dengan desa wisatanya. Komoditas utama Desa Baru Jambi Tulo adalah pertanian dan perkebunan. Salah satu kekayaan alamnya yakni rotan, kayu, dari segi perkebunan terdapat kelapa sebagai salah satu komoditas di desa Jambi Tulo yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan yaitu wisata Lubuk Penyengat. Wisata Lubuk Penyengat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitar lubuk seperti semak belukar, yang pada awalnya di bersihkan untuk dijadikan tempat tongkrongan masyarakat setempat, namun dengan memanfaatkan potensi yang ada masyarakat membuat kerajinan yang terbuat dari rotan dan sabut kelapa yang sebelumnya hanyalah sampah. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemuda pemudi Desa Baru Jambi Tulo dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran akan pentingnya inovasi sumber daya alam dan wisata sehingga mempunyai nilai guna.

Adanya kesadaran akan pentingnya wisata merupakan awal mula terbentuknya Pokdarwis yang merupakan singkatan dari kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata atau disingkat dengan pokdarwis adalah masyarakat lokal

yang terdiri dari pemuda pemudi, ibu pkk dan masyarakat setempat yang ikut berkontribusi dalam pembuatan wisata lubuk penyengat di Desa Baru Jambi Tulo.

Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam wisata lubuk penyengat awalnya dirancang dan dilakukan oleh Pemuda yang berasal dari anggota karangtaruna Desa Baru Jambi Tulo dengan keikutsertaan Ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) serta masyarakat Desa Baru Jambi Tulo yang sadar akan pentingnya wisata. Dalam proses pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam pokdarwis khususnya pemuda pemudi karang taruna. Yang mana dalam hal ini pemuda pemudi karang taruna yang sadar akan pentingnya wisata merupakan penemu (*founder*) wisata Lubuk Penyengat, dengan dilakukan proses perencanaan terlebih dahulu.

Perencanaan yang dilakukan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana system pengelolaan wisata yang akan dilaksanakan. Hal ini tentu tidak terlepas dari anggaran yang diperlukan berupa pendanaan, dalam hal pendanaan pokdarwis melakukan sumbangsih untuk melakukan inovasi inovasi terbaru dengan cara iuran dalam proses pembangunannya. Kemudian keuntungan yang di dapatkan dari pembangunan wisata tersebut dilakukan pembagian hasil bagi warga setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pelaksanaan pembangunan wisata lubuk penyengat tentu dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan aparat pemerintah Desa Baru Jambi Tulo, yang sekaligus pemerintah desa merupakan pengontrol yang memonitoring wisata lubuk penyengat secara langsung.

Wisata Lubuk Penyengat yang dikelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) membuat menarik masyarakat setempat untuk mengambil gambar yang kemudian di unggah melalui media sosial. Hal ini semakin menarik minat kalangan masyarakat umum yang akhirnya menjadi desa wisata yang dikunjungi masyarakat luar daerah setempat. Berikut gambaran wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo:

Gambar 1.1.

Wisata Di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo



Sumber: Jambiline.com

Wisata Lubuk penyengat mulai dibentuk pada awal tahun 2017 yang semua anggotanya merupakan pemuda dari Desa Baru Jambi Tulo. Wisata Lubuk Penyengat telah mampu menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat Desa Jambi Tulo. Keterlibatan pemuda dan masyarakat Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo tersebut merupakan salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Menurut Adisasmita Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat

(*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan).⁵

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Alfitri mengemukakan bahwa:

“Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan berbagai aktivitas program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial, maupun politik. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk revitalisasi konsep pembangunan, untuk menghasilkan sebuah perubahan positif bagi kehidupan”.⁶

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan pemasaran dan aksesibilitas, serta peningkatan mutu dan pelayanan melalui peningkatan keahlian-keahlian sumber daya manusia merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. Dimana pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan pariwisata tersebut merupakan salah satu wujud dari pendidikan non formal. Dalam pendekatan sumber daya manusia, tujuan-tujuan dari pembangunan adalah optimalisasi dan membentuk manusia yang seutuhnya dalam aktivitas yang lebih produktif dan pengembangan sepeuhnya mungkin pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan

⁵Adisasmita, Raharjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu,, 200)6, hlm.64.

⁶ *Ibid.*

keterampilan(*skill*), dari setiap kekuatan yang berhubungan dengan aktivitasnya setiap individu masing-masing.⁷

Desa Baru Jambi Tulo merupakan salah satu desa di Kecamatan Maro Sebo di daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik pariwisata alam, budaya, religi, kuliner, pendidikan ataupun yang lainnya. Lokasinya berjarak 15 km dari Kota Jambi. Banyaknya objek wisata seperti danau, sarang burung yang terbuat dari kayu dan rotan, badak beduri yang terbuat dari serabut kelapa, gorila gambut terbuat dari serabuk ijuk, bintang sungai, pindok-pondok yang mana rata-rata objek tersebut menggunakan komoditi setempat seperti rotan, kayu dan sabut kelapa. Hal ini membuat daya tarik wisata khususnya wisata lubuk penyengat di Desa Baru Jambi Tulo ini meningkat. Dan yang paling diminati adalah wisata danau yang merupakan salah satu kebudayaan pariwisata dan rekreasi alam. Akan tetapi saat ini jumlah pengunjung yang datang ke Desa Baru Jambi Tulo mengalami penurunan drastis hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2.

Jumlah Pengunjung Wisata ke Desa Baru Jambi Tulo Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Pengunjung
1	2018	5.200
2	2019	2750
3	2020	970

Sumber: Data Olahan Desa Baru Jambi Tulo

⁷Rina Munawaroh, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Suwanting*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Magelang, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm.10.

Pariwisata Danau ini seharusnya dapat dioptimalkan mengingat banyaknya pariwisataawan yang tertarik untuk mengayuh perahu mengelilingi danau. Hal ini tidak dilihat sebagai potensi pendapatan saja, namun juga sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan, sebagai salah satu motivator untuk perkembangan industri pariwisata. Kemudian dalam hal pengetahuan masyarakat tentang posisi dan jenis wisata yang ada kurang diketahui, dalam artian pengetahuan tentang wisata ini hanya diketahui pemuda dan anggota Pokdarwis saja. Penanaman pengetahuan akan pentingnya wisata dari masyarakat sangatlah penting Karena dari sebuah pariwisata danau, para wisataawan atau pengunjung akan membutuhkan informasi.

Dengan adanya pariwisata tersebut berdampak pada masyarakat di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo khususnya meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hal yang sama yaitu, penelitian skripsi dengan judul *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)* yang dilakukan oleh Deddy Prasetya Maha Rani mahasiswa dari Universitas Airlangga Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2017. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Pariwisata di daerah-daerah sangatlah banyak bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemerintah dan masyarakat daerah saling membantu dalam pengembangannya tersebut sehingga akan mengangkat segi ekonomi, budaya dan pendidikan daerah itu. Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional. .

Selanjutnya penelitian Skripsi yang berjudul *Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah)* yang dilakukan oleh Agus Bahrudin pada tahun 2017. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Inovasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna. Dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di daerah. Oleh karena itu daerah perlu menyusun visi, misi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar pengembangan pariwisata daerah semakin terarah sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan desa wisata melalui penyediaan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pengembangan desa wisata bukan hanya sebagai atraksi bagi wisatawan tetapi memiliki fungsi yaitu untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Demi keberhasilan industri pariwisata maka keterlibatan masyarakat menjadi faktor penunjang utama, untuk mengembangkan inovasi dari sumber daya alam yang ada sehingga diperlukan partisipasi masyarakat di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Menghadapi tantangan kedepannya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tentu perlu melakukan inovasi yang berdasarkan atas partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kajian yang ada penulis menganalisis bahwasanya inovasi berdasarkan partisipasi dalam bidang pariwisata sangat diperlukan mengingat peluang dibidang pariwisata yang cukup besar sehingga perlu ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Partisipasi Masyarakat Pokdarwis Terhadap Pemerintah Dalam Mendukung Wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat pokdarwis terhadap pemerintah dalam mendukung wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi?
2. Apa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pokdarwis terhadap pemerintah dalam mendukung wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tahapan partisipasi masyarakat pokdarwis terhadap pemerintah dalam mendukung wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi.

2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan tahapan partisipasi masyarakat pokdarwis terhadap pemerintah dalam mendukung wisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai kajian perpustakaan bagi penelitian berikutnya mengenai partisipasi masyarakat pokdarwis dalam penyediaan inovasi pariwisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, kajian politik dan birokrasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkhusus dalam hal mengenai partisipasi masyarakat pokdarwis dalam penyediaan inovasi pariwisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Partisipasi

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.⁸ Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti

⁸ Adisasmita, Raharjo, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 63.

dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Masyarakat adalah pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sendiri dan kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai sumber ekonomi kreatif masyarakat.

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikut sertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama.⁹ Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa:

“Pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya”.¹⁰

⁹ Sumaryadi, I Nyoman, *Sosiologi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 46

¹⁰ Adisasmita, Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 64.

H.A.R. Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah :

“Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya”.¹¹

Menurut Soegarda Poerbakawatja partisipasi adalah:

“Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya”.¹²

Dalam partisipasi ada beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan setiap warga masyarakat dapat berupa:¹³

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

Sedangkan menurut Abu Huraerah terdapat bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:¹⁴

1. Partisipasi dalam pikiran, dapat berupa kegiatan saat pertemuan atau rapat.

¹¹ *Ibid*

¹² *Op. Cit*, hlm. 64.

¹³ Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Yudhistira, 22011), hlm. 45

¹⁴ Abu Huraerah, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Gaung Prakarsa, 2011), hlm. 116

2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang bisaanya berupa uang, makanan, dan sebagainya.
4. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Konsep partisipasi itu sendiri telah lama menjadi bahan kajian. Kata “partisipasi” dan “partisipatoris” merupakan dua kata yang sangat sering digunakan dalam bangunan. Keduanya memiliki banyak makna yang berbeda. Pengertian partisipasi menurut Mikkelson, antara lain sebagai berikut.¹⁵

“(a) partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. (b) partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk menanggapi proyekproyek pembangunan. (c) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. (d) partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial. (e) partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. (f) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.”

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu: adanya kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.

Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan(warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan

¹⁵ Mikkelson, Britha, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 58

berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

1.5.2. Teori Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi

antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹⁶

Menurut Emile Durkheim mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama”.¹⁷

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya:

“Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya”.¹⁸

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warganegara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatifitas dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan-pertemuan, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat kelompok atau pertemuan itu, akan saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.¹⁹

¹⁶Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi dan teori sosial Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010), hlm.50.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm.53.

¹⁹ Adi, Isbandi, *Membangun Masyarakat Partisipatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 19

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena masyarakat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut oleh karena itu:²⁰

- (a) Kegiatan sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- (b) Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha menggerakkan partisipasi masyarakat.
- (c) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- (d) Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun desanya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- (e) Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat, terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:²¹

- a. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Partisipasi di dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.
- c. Partisipasi di dalam kemanfaatan merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah

²⁰ Sumaryadi, I Nyoman, *Op. Cit.* hlm. 49

²¹ *Ibid.*

keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi.

- d. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, maka ada 4 jenis partisipasi yaitu:²²

- a. *Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.

²² Nasution Z, *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm. 18

- b. *Participation in implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartispasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-sekali atau berulang-ulang.
- c. *Participation in benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahteraannya termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil-hasil pembangunan.

- d. *Participation in evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasilhasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saransaran, kritikan atau protes.

Partisipasi berbasis masyarakat memberikan manfaat-manfaat yang meliputi 5 (lima) dimensi yang merupakan aspek utama dalam pembangunan adalah sebagai berikut:²³

- a. Dimensi Ekonomi yaitu menimbulkan dana untuk mengembangkan komunitas, menciptakan lapangan pekerjaan disektor kepariwisataan, mengembangkan pendapatan warga sekitar wisata
- b. Dimensi Sosial yaitu dengan semakin meningkatkan mutu hidup, meningkanya kebanggaan komunitas, peran untuk gender meningkat dan adil antara laki-laki dan perempuan, faktor usia seperti muda dan tua, bahkan memperkuat sistem organisasi.
- c. Dimensi Budaya yaitu berupa mendorong warga agar dapat menghormati perbedaan nilai budaya, membantu pertukaran budaya semakin berkembang, kebudayaan setempat semakin berkembang akibat nilai budaya yang tertempel erat.
- d. Dimensi Lingkungan yaitu lingkungan menjadi terjaga, pengelolaan sampah menjadi lebih baik, kepedulian mengenai konservasi dan preservasi lingkungan menjadi meningkat.

²³ Sunaryo Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya*, (Makassar: Gava Media, 2013), hlm. 143

- e. Dimensi Politik yaitu penduduk lokal akan meningkatkan partisipasi mereka, kekuasaan komunitas menjadi lebih luas dan membuat masyarakat mengerti akan hak-hak dalam mengelola sumberdaya alam.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.²⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs, rewards dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.²⁵

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat dikatakan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dengan demikian dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dirangkum indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

²⁴ Sumardjo dan Saharudin, *Metode-Metode Partisipatif*, (Bogor: IPB Press, 2003), hlm. 35

²⁵ Sahidu Arifuddin, *Partisipasi Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 147

a) ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; b) ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang pendanaan pelaksanaan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat; c) ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya; d) ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut, bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama dan menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

1.5.3. Obyek Wisata

Objek Wisata atau "*tourist atracction*" adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Dalam Ilmu Kepariwisata, Objek Wisata atau lazim disebut Atraksi merupakan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, objek Wisata atau disebut Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat

menentukan tersebut maka, daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke obyek wisata.²⁶

Obyek wisata adalah sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. Hal yang dimaksud berupa:²⁷

- 1) Berasal dari alam, misalnya pantai, pemandangan alam, pegunungan, hutan, dan lain-lain.
- 2) Merupakan hasil budaya, misalnya museum, candi, dan galeri.
- 3) Merupakan kegiatan masyarakat keseharian, misalnya tarian, karnaval, dan lain-lain.

Suatu obyek wisata atau daya tarik wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, syarat-syarat tersebut adalah:²⁸

- 1) *Something to see*

Di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata, yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dengan perkataan lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus, di samping itu ia harus mempunyai pula atraksi wisata yang dapat dijadikan entertainments bila orang datang ke sana.

²⁶ Suwanto Gamal, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hlm. 19

²⁷ Wardiyanta, *Metode Penelitian Kepariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), hlm.

²⁸ Yoeti, Oka, *Pengantar Ilmu Kepariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 177

2) *Something to do*

Di tempat tersebut setiap banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi atau amusement dan tempat atau wahana yang bisa digunakan wisatawan untuk beraktivitas seperti olah raga, kesenian maupun kegiatan lain yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama.

3) *Something to buy*

Di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing. Fasilitas untuk berbelanja ini tidak hanya menyediakan barang-barang yang dapat dibeli, tetapi harus pula tersedia sarana-sarana pembantu lain untuk lebih memperlancar seperti money changer, bank, kantor pos, dan lain-lain.

Ada tiga jenis atau bentuk bahan dasar yang harus dimiliki oleh suatu industri pariwisata, yaitu antara lain:²⁹

1) Obyek wisata alam (*natural resources*)

Bentuk dan obyek wisata ini berupa pemandangan alam, seperti obyek wisata berwujud pada lingkungan, pegunungan, pantai, lingkungan hidup yang berupa flora dan fauna atau bentuk lain yang menarik.

2) Obyek wisata budaya (*human resources*)

²⁹ Asmoro, Dwi, *Dampak Perkembangan Pariwisata di Objek Wisata Panglipuran*, Jurnal Perhotelan dan Pariwisata, Volume 1 Nomor 1, hlm. 14

Bentuk dan obyek wisata ini lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan maupun kehidupan manusia seperti tarian tradisional ataupun kesenian, upacara adat, upacara keagamaan, upacara pemakaman, dan lain-lain.

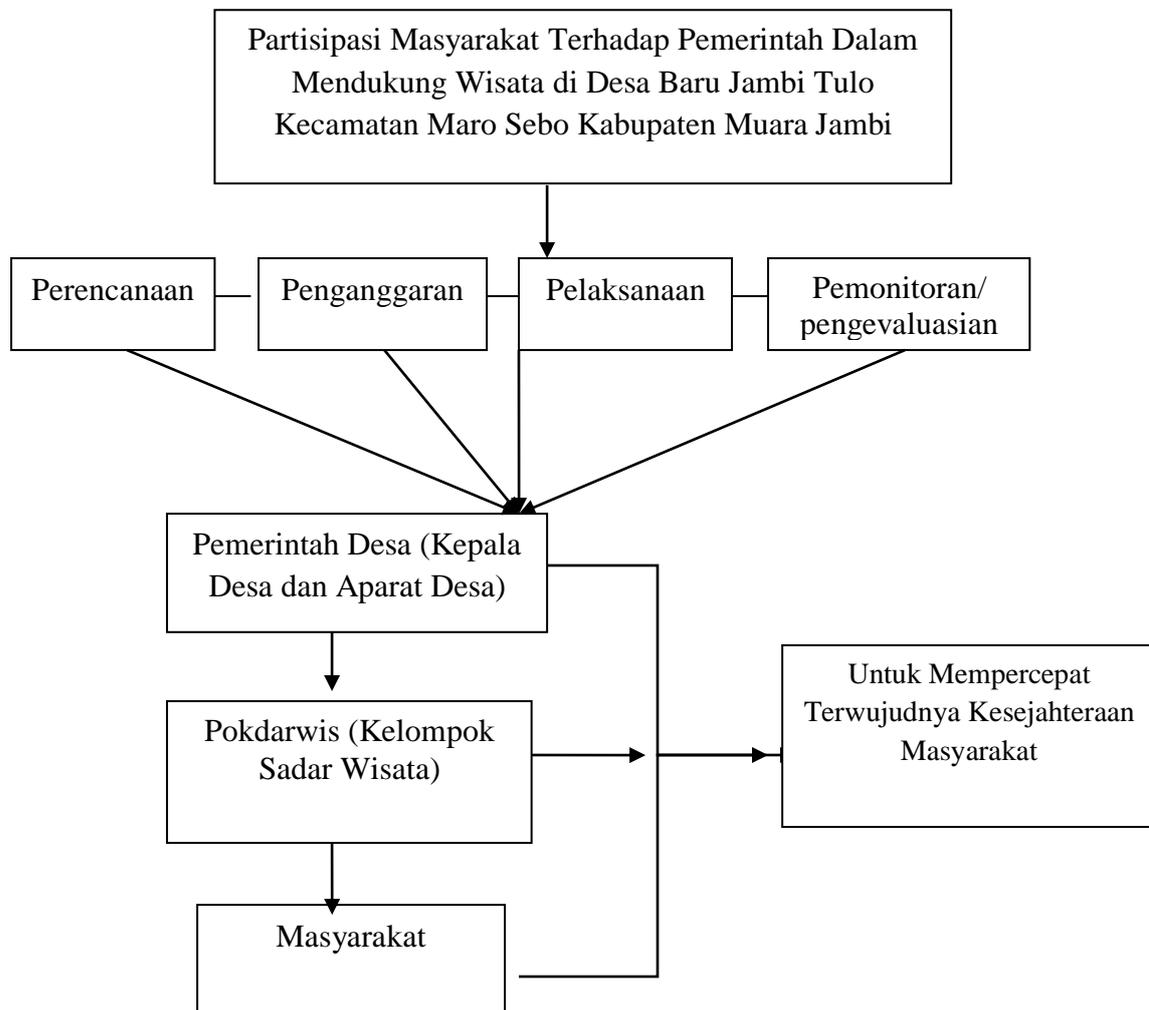
3) Obyek wisata buatan manusia (*man made resources*)

Bentuk dan wujud obyek wisata ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas serta kreativitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia. Wujudnya berupa museum, tempat ibadah, kawasan wisata yang dibangun seperti wisata taman mini, taman wisata kota, kawasan wisata ancol, dan sebagainya.

Suatu tempat dapat menjadi suatu obyek wisata harus mempunyai suatu potensi ekologis yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Potensi tersebut dapat berupa kenampakan alam alami yang dimiliki oleh tempat tersebut, dalam hal ini stakeholder yang bertanggung jawab terhadap obyek wisata tersebut. Faktor-faktor lokasional yang mempengaruhi pengembangan potensi obyek wisata adalah kondisi fisis, aksesibilitas, pemilikan dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik. Selain itu unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan meliputi obyek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, sarana wisata, infrastruktur dan masyarakat/ lingkungan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



1.7. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa uraian dan langkah-langkah yang dikemukakan seperti berikut.

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menggambarkan mengenai partisipasi masyarakat pokdarwis dalam penyediaan inovasi pariwisata di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Tahun 2018.

Menurut Flick penelitian kualitatif ialah “keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan”.³⁰Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Penelitian kualitatif akan menggunakan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya deskriptif, data penelitian kualitatif berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi, dan banyak lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.³¹

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berbasis pada konsep “*Going Exploring*” yang melibatkan in-depth dan

³⁰Djma’an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.130.

³¹*Ibid*, hlm. 132.

case-oriented study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal dengan tujuan membuat fakta mudah dipahami dan memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru. Penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interpretasi terhadap multi perspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari peneliti semata. Sumber data bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.³²

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam wilayah hukum Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Adapun alasan pemusatan lokasi tersebut karena di Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo merupakan tempat yang dapat dikatakan kaya akan sumber daya alam dan manusia yang seharusnya mampu dikembangkan menjadi desa wisata.

1.7.3. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Flick adalah “keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan”³³. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Penelitian kualitatif akan menggunakan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Karena sifatnya deskriptif, data penelitian

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif “Teori dan Praktek”*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm.79.

³³ *Ibid.*

kualitatif berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi, dan banyak lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif.³⁴

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif berbasis pada konsep “*Going Exploring*” yang melibatkan in-depth dan *case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal dengan tujuan membuat fakta mudah dipahami dan memungkinkan (sesuai modelnya) dapat menghasilkan hipotesis baru. Penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interpretasi terhadap multi perspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat didalam penelitian, tidak hanya dari penelitiannya semata. Sumber data bermacam-macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.³⁵

1.7.4. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian ditujukan kepada masyarakat pokdarwis Desa Baru Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang terbentuk berdasarkan faktor wilayah dan asal daerah.

³⁴ *Ibid*, hlm.132.

³⁵*Ibid*.

1.7.5. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (metode tanya jawab) dengan sampel responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang ditentukan terlebih dahulu oleh penulis.

b. Data Sekunder

Bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer bahan hukum skunder ini dapat diperoleh melalui literatur hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini. dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

1.7.6. Teknik penentuan informan

Dalam penelitian kualitatif menentukan informan kunci dan informan tambahan menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, dimana teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”³⁶ Dimana orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.85.

sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap dan memuaskan. Teknik ini dikenal dengan *Snowbal Sampling* adalah “teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar”.³⁷

Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan informan yang terdiri dari;

1. Informan Kunci (*Key Informan*) berjumlah 3 Orang yaitu;
 - a. Kepala Desa, Desa baru
 - b. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
 - c. Masyarakat pokdarwis
2. Informan tambahan,

Informan Tambahan yaitu seseorang yang mengetahui dan memiliki bagian informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Maka yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah.

- a) Pegawai Desa
- b) Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

1.7.7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui observasi dan *interview* (wawancara), selain itu juga dengan mempelajari dokumen dan artikel koran.

³⁷ *Ibid.*

1.7.8. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif dari Milles & Huberman dalam Sugiyono yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.³⁸

a) Reduksi data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. Data tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode sangat memungkinkan untuk mendapatkan data yang banyak dan belum relevan. Perlu dilakukan reduksi data dengan cara abstraksi membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

b) *Display Data*

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk uraian singkat dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Tujuan dari display data dalam penelitian ini yaitu memudahkan peneliti dalam memahami apa

³⁸ Rina Munawaroh, *Op. Cit*, hlm.379.

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c) Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulannya dari data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian antara pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Inovasi Pariwisata di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muara Jambi Tahun 2018.

1.7.9. Triangulasi Data

Teknik yang digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran data tersebut peneliti menggunakan teknik ketekunan pengamatan lapangan dan triangulasi.³⁹ Ketekunan pengamatan dengan memperpanjang pengamatan dan teknik triangulasi dengan triangulasi teknik berfungsi sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi sumber dengan mengecek keabsahan data dari sumber pengelola pariwisata, masyarakat Desa Baru Jambi Tulo, dan pengunjung wisata Lubuk

³⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003), hlm.38.

penyengat sedangkan triangulasi metode berasal dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi proposal, terdiri atas:

- BAB I, Pendahuluan: Merupakan bab yang didalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka fikir , landasan teori dan sistematika penulisan.
- BAB II, Pembahasan: Berisikan bab yang menyajikan tentang tinjauan umum dan deskripsi wilayah yang sedang dibahas.
- BAB III, Isi : Merupakan bab yang membahas terkait hasil penelitian dilapangan yang berisikan jawaban dari perumusan masalah hasil penelitian.
- BAB IV, Penutup: Merupakan bab dimana berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.